



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : TAUFIQ ISTIANTO
- Jabatan** : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
- NHK** : 764824

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.020.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/210 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
 - Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI , Rp. 520.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 272.500.000
- MOTOR, YAMAHA MIO SKUTER MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
 - MOTOR, HONDA SUPRA X BEBEK MANUAL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
 - MOBIL, TOYOTA INNOVA V MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
 - LAINNYA, POLYGON SEPEDA KAYUH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
 - MOTOR, YAMAHA AEOROX 2021 MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
 - LAINNYA, DOMINATE SEPEDA KAYUH Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 72.500.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. 250.000.000
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.791.543



F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.700.000
Sub Total	Rp.	2.642.491.543
III. HUTANG	Rp.	90.032.546
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.552.458.997

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.